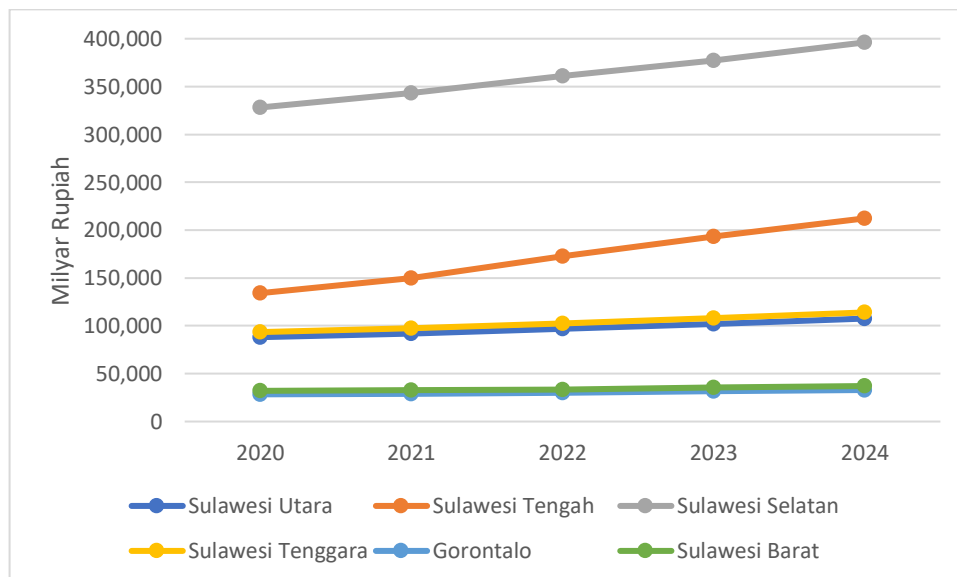


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

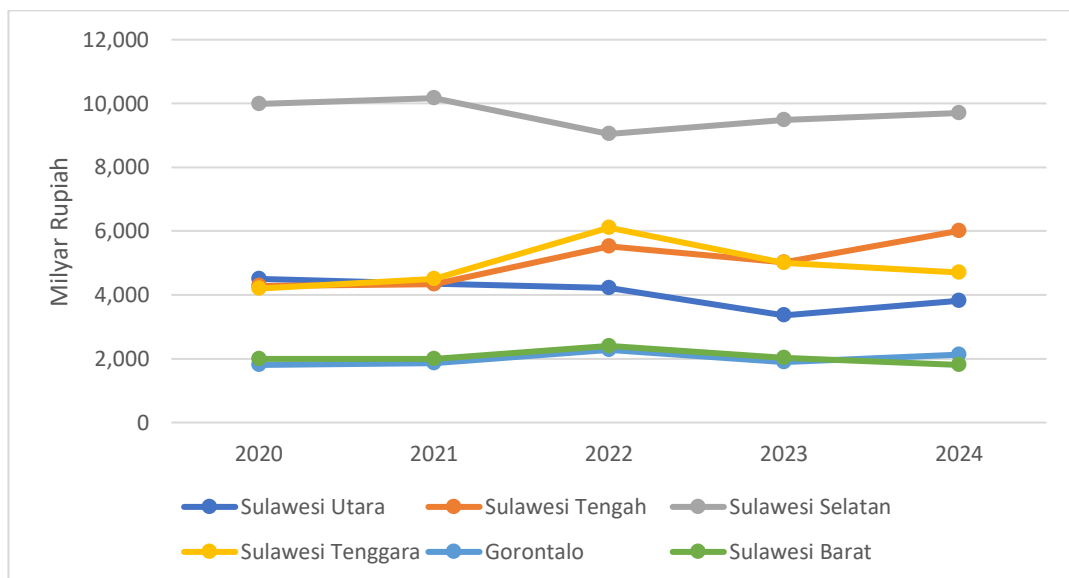
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan daerah yang mencerminkan peningkatan kapasitas produksi serta kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai suatu proses peningkatan pendapatan nasional riil atau produk domestik bruto riil yang mencerminkan kemajuan dalam aktivitas ekonomi suatu negara. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi pada periode tertentu lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya (Prasetiono, 2010; Adisetiawan, 2009). Pertumbuhan ini terlihat dari meningkatnya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atau output barang dan jasa secara nyata yang berdampak pada kenaikan pendapatan masyarakat.



Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi-Provinsi di Pulau Sulawesi dari 2020-2024

Berdasarkan data badan pusat statistik, PDRB tahun 2020 – 2024 provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan secara konsisten menjadi provinsi dengan PDRB tertinggi di Pulau Sulawesi, meningkat dari Rp328.155 miliar pada 2020 menjadi Rp396.142 miliar pada 2024. Sementara

itu provinsi Gorontalo secara konsisten menjadi provinsi dengan PDRB terendah, meskipun tetap meningkat dari Rp28.425 miliar pada 2020 menjadi Rp32.950 miliar pada 2024. Sulawesi Barat sedikit lebih tinggi dari Gorontalo, dengan PDRB meningkat dari Rp32.074 miliar menjadi Rp37.088 miliar, tetapi tetap berada di kelompok bawah. Kesenjangan antara Sulawesi Selatan dan Gorontalo terlihat sangat besar, di mana pada 2024 PDRB Sulawesi Selatan hampir dua belas kali lipat lebih tinggi dibanding Gorontalo. Hal ini mencerminkan perbedaan kapasitas ekonomi, basis industri, serta konsentrasi aktivitas produksi antarprovinsi di Sulawesi. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antarprovinsi di Pulau Sulawesi. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi berbeda-beda.



Gambar 1.2 Pengeluaran Pemerintah Provinsi-Provinsi di Pulau Sulawesi dari 2020-2024

Salah satu faktor yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pengeluaran pemerintah di wilayah Pulau Sulawesi dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang bervariasi antarprovinsi. Provinsi Sulawesi Selatan secara konsisten memiliki nilai pengeluaran pemerintah tertinggi, mencapai Rp 9,697 miliar pada tahun 2024, mencerminkan peran wilayah ini sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di kawasan timur Indonesia. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah terendah tercatat di Provinsi Sulawesi Barat,

yang hanya mencapai Rp1,806 miliar pada tahun 2024, menandakan kapasitas fiskal daerah yang lebih terbatas. Sementara itu, Sulawesi Tengah mengalami peningkatan signifikan dari Rp4,281 miliar pada 2020 menjadi Rp6,009 miliar pada 2024, yang dipicu oleh meningkatnya investasi industri dan pembangunan infrastruktur di sektor pertambangan.

Salah satu faktor yang berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah adalah investasi. Berdasarkan teori Musgrave dan Rostow, pembangunan ekonomi suatu negara berlangsung dalam tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal pemerintah banyak melakukan investasi untuk penyediaan infrastruktur dasar, pada tahap menengah investasi swasta menjadi pendorong kebutuhan ekspansi fiskal publik untuk menyediakan prasarana, layanan, dan infrastruktur pendukung untuk aktivitas investas swasta yang semakin intensif. sedangkan pada tahap lanjut pengeluaran pemerintah lebih difokuskan pada program sosial seperti pendidikan, jaminan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Investasi swasta dalam hal ini yaitu penanaman Modal Asing dan penanaman Modal Dalam Negeri berfungsi meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat alih teknologi di daerah (Borensztein, De Gregorio, & Lee, 1998).

Berdasarkan data realisasi PMA di Pulau Sulawesi tahun 2020 hingga 2024, Sulawesi Tengah secara konsisten menjadi provinsi dengan nilai investasi tertinggi. Pada tahun 2024, nilai PMA Sulawesi Tengah mencapai 9.019,3 juta USD, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020 sebesar 1.779 juta USD, menunjukkan tingginya minat investor asing terhadap sektor-sektor potensial di provinsi ini, terutama industri tambang dan pengolahan. Sebaliknya, Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan realisasi PMA terendah selama periode tersebut, di mana pada tahun 2024 hanya mencatat 2,2 juta USD, jauh tertinggal dibandingkan provinsi lainnya.

Berbeda dengan PMA, PMDN dinilai memiliki kontribusi yang lebih stabil terhadap pembangunan ekonomi. Berdasarkan data realisasi PMDN di Pulau Sulawesi tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan nilai PMDN tertinggi. Pada tahun 2021, Sulawesi Selatan mencatat puncak investasi sebesar 12.075 miliar rupiah, dan meskipun mengalami

fluktuasi di tahun-tahun berikutnya, provinsi ini tetap menjadi pusat aktivitas investasi terbesar dengan nilai 8.412 miliar rupiah pada tahun 2024. Sementara itu, Sulawesi Barat menempati posisi sebagai provinsi dengan realisasi PMDN terendah selama periode tersebut, dengan nilai yang hanya mencapai 253 miliar rupiah pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 2.893 miliar rupiah pada tahun 2024. Rendahnya PMDN di Sulawesi Barat mencerminkan keterbatasan potensi investasi dan infrastruktur yang belum berkembang optimal. Namun, tingginya investasi tidak selalu menjamin pertumbuhan ekonomi yang merata, karena efektivitas investasi bergantung pada stabilitas politik, kualitas kelembagaan, dan efisiensi pengeluaran publik.

Dalam aspek kelembagaan dan politik, teori ekonomi kelembagaan baru yang dikemukakan oleh Oliver Williamson (1975) menegaskan bahwa lembaga politik yang inklusif seperti sistem demokrasi berperan penting dalam menciptakan insentif ekonomi yang mendorong investasi dan inovasi. Demokrasi yang baik memperkuat akuntabilitas pemerintah, menekan praktik korupsi, dan memastikan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan publik (Barro, 2015). Di Indonesia, tingkat demokrasi diukur melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang menggambarkan sejauh mana prinsip-prinsip partisipasi politik, supremasi hukum, dan kebebasan sipil diterapkan di tingkat provinsi.

Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 hingga 2024, Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan nilai tertinggi dengan angka mencapai 81,87 pada tahun 2024. Pencapaian ini menandakan bahwa Sulawesi Utara memiliki tingkat partisipasi politik, kebebasan sipil, dan lembaga demokrasi yang relatif kuat dibandingkan provinsi lain di Pulau Sulawesi. Sementara itu, provinsi dengan nilai indeks demokrasi terendah adalah Sulawesi Barat dengan angka 74,56 pada tahun 2024. Nilai yang bervariasi ini menunjukkan adanya perbedaan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah dalam mengoptimalkan kebijakan ekonomi. Kualitas demokrasi yang tinggi diyakini mampu memperkuat efektivitas pengeluaran pemerintah. Dalam perspektif Keynesian, pengeluaran pemerintah berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk menjaga kestabilan ekonomi dan mendorong permintaan agregat (Keynes, 1936). Pemerintah yang demokratis cenderung memiliki alokasi anggaran yang lebih transparan, partisipatif, dan

responsif terhadap kebutuhan publik, sehingga belanja publik menjadi lebih produktif (Rodrik & Subramanian, 2010).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia, seperti Susanti dan Siregar (2025) serta Rasjid dkk. (2021) menunjukkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Namun, temuan Dahliah (2023) dan Pratama & Rofiuddin (2023) menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing tidak selalu memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan hasil penelitian Afrizal (2015) yang menegaskan bahwa PMDN lebih berperan dominan terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan PMA. Adapun penelitian Zuraida (2024) memperkuat pandangan bahwa PMDN memiliki peran penting secara konsisten terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, hasil-hasil tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan dalam signifikansi maupun arah pengaruh antar variabel seperti PMDN, PMA, belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebagian besar penelitian tersebut hanya berfokus pada hubungan langsung antara PMA, PMDN, Pengeluaran Pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan faktor kelembagaan seperti demokrasi atau pengeluaran pemerintah (Safitri, 2022; Pratama & Rofiuddin, 2023). Penelitian yang memasukkan variabel kelembagaan umumnya dilakukan pada level nasional dan jarang mengkaji variasi antarprovinsi di kawasan timur Indonesia. Selain itu, belum ada penelitian yang menggunakan pengeluaran pemerintah sebagai variabel mediasi antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi.

Padahal, teori ekonomi kelembagaan baru menekankan bahwa demokrasi suatu negara tidak hanya ditentukan oleh stabilitas politiknya, tetapi juga oleh kualitas dan kinerja institusi dalam mengelola serta menyalurkan sumber daya publik secara efektif (Acemoglu, Johnson, & Robinson, 2005). Pemerintah daerah yang demokratis cenderung lebih akuntabel dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor produktif, seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Alesina et al., 2019). Dengan demikian, peran mediasi pengeluaran pemerintah

menjadi aspek yang krusial untuk diteliti lebih lanjut. Dari pembahasan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana “Pengaruh Mediasi Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Sulawesi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah penanaman modal asing berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pengeluaran pemerintah di Pulau Sulawesi?
2. Apakah penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pengeluaran pemerintah di Pulau Sulawesi?
3. Apakah tingkat demokrasi berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah di Pulau Sulawesi?
4. Apakah pengeluaran pemerintah memediasi penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan tingkat demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pengeluaran pemerintah di Pulau Sulawesi.
2. Untuk menganalisis pengaruh penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pengeluaran pemerintah di Pulau Sulawesi.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat demokrasi terhadap pengeluaran pemerintah di Pulau Sulawesi.

4. Untuk menganalisis pengeluaran pemerintah sebagai variabel mediasi penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan tingkat demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan strategi investasi yang lebih tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kondisi demokrasi di masing-masing provinsi di Pulau Sulawesi
2. Bagi akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi ilmiah untuk memperkaya literatur terkait hubungan antara tingkat demokrasi, investasi, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, serta sebagai pijakan bagi penelitian lanjutan dengan ruang lingkup yang lebih luas.
3. Bagi penulis, penelitian ini merupakan bagian dari proses akademik yang diharapkan dapat mengasah kemampuan analitis, pemahaman teoritis, serta keterampilan metodologis dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Hasanuddin.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynesian

Teori pertumbuhan ekonomi Keynesian berangkat dari pandangan bahwa aktivitas ekonomi dalam jangka pendek hingga menengah sangat ditentukan oleh tingkat permintaan agregat. John Maynard Keynes menolak asumsi klasik bahwa pasar selalu mampu menyesuaikan diri secara otomatis menuju keseimbangan kesempatan kerja penuh. Menurut Keynes, fluktuasi investasi, konsumsi, dan ekspektasi pelaku ekonomi dapat menyebabkan kekurangan permintaan yang berlarut-larut. Dalam kondisi seperti ini, kapasitas produksi tidak termanfaatkan secara optimal dan pertumbuhan ekonomi melambat. Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal menjadi instrumen utama untuk menstabilkan dan mendorong pertumbuhan.

Permintaan agregat dalam kerangka Keynesian terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Investasi swasta dipandang sebagai komponen yang paling volatil karena sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga, ekspektasi keuntungan, dan ketidakpastian ekonomi. Ketika investasi melemah, konsumsi ikut menurun dan menciptakan efek kontraksi berantai terhadap pendapatan nasional. Pemerintah kemudian berperan sebagai penyeimbang dengan meningkatkan belanja publik untuk menutup kesenjangan permintaan.

Konsep penting dalam teori Keynesian adalah *multiplier effect*, yaitu kemampuan belanja awal untuk menciptakan peningkatan pendapatan yang lebih besar melalui putaran konsumsi dan produksi. Ketika pemerintah meningkatkan belanja, pendapatan masyarakat naik dan mendorong konsumsi tambahan, sehingga output nasional meningkat lebih besar dari nilai belanja awal. Efek pengganda ini menjadi dasar keyakinan bahwa kebijakan fiskal mampu mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya multiplier dipengaruhi oleh kecenderungan konsumsi masyarakat dan struktur ekonomi.

Dalam jangka menengah, belanja pemerintah tidak hanya berdampak pada sisi permintaan, tetapi juga memperluas kapasitas produksi ekonomi. Investasi publik pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi distribusi. Hal ini memperkuat potensi pertumbuhan jangka panjang dan mengurangi hambatan struktural. Keynesian modern mengakui bahwa kualitas komposisi belanja sama pentingnya dengan besaran belanja.

2.1.2 Teori Musgrave-Rostow

Dalam pandangan ekonomi publik, Richard A. Musgrave menekankan bahwa peran pemerintah dalam perekonomian sangat dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat dan kondisi pembangunan ekonomi suatu negara. Sementara itu, Walt Whitman Rostow menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi berlangsung melalui tahapan-tahapan yang sistematis hingga mencapai tingkat kematangan ekonomi. Integrasi pemikiran kedua tokoh ini kemudian melahirkan konsep yang menjelaskan bagaimana perubahan struktur ekonomi mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ram (1986), hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan dinamika yang berbeda pada setiap tahap pembangunan.

Menurut pandangan Musgrave, peran pemerintah dalam perekonomian dapat dijelaskan melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh sektor swasta. Fungsi distribusi berhubungan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan fungsi stabilisasi bertujuan menjaga stabilitas ekonomi makro melalui kebijakan fiskal dan pengeluaran pemerintah. Studi empiris yang dilakukan oleh Barro (1990) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang produktif dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam kerangka teori pembangunan Rostow, pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak terjadi secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan perkembangan yang berurutan. Tahapan tersebut dimulai dari masyarakat tradisional, prasyarat untuk lepas landas, tahap lepas landas, menuju kedewasaan

ekonomi, hingga tahap konsumsi massal yang tinggi. Setiap tahap memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, termasuk dalam hal struktur produksi, investasi, dan peran pemerintah dalam pembangunan. Pada tahap awal pembangunan, pemerintah memiliki peran yang sangat dominan karena sektor swasta belum berkembang secara optimal. Penelitian oleh Aghion dan Howitt (1992) menunjukkan bahwa intervensi pemerintah pada tahap awal pembangunan dapat mempercepat proses akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi.

Kombinasi pemikiran Musgrave dan Rostow menjelaskan bahwa pola pengeluaran pemerintah akan berubah seiring dengan perkembangan ekonomi suatu negara. Pada tahap awal pembangunan, pengeluaran pemerintah cenderung lebih besar dibandingkan dengan pendapatan nasional. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan investasi yang besar dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Infrastruktur tersebut menjadi fondasi penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat dan sektor swasta di masa depan.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, sektor swasta mulai berkembang dan investasi swasta meningkat secara signifikan. Meskipun demikian, pemerintah tetap memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi kegiatan produksi dan investasi. Pemerintah juga perlu mengatasi berbagai bentuk kegagalan pasar yang dapat muncul akibat ketidaksempurnaan mekanisme pasar. Dalam kondisi ini, pengeluaran pemerintah difokuskan pada penyediaan barang publik yang berkualitas serta regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, struktur pengeluaran pemerintah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada tahap ini, kebutuhan masyarakat tidak lagi hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar, tetapi juga peningkatan kualitas hidup. Pemerintah mulai meningkatkan pengeluaran untuk sektor sosial seperti pendidikan tinggi, kesehatan, perlindungan sosial, dan program kesejahteraan masyarakat. Perubahan struktur pengeluaran ini mencerminkan meningkatnya tingkat kesejahteraan dan kompleksitas ekonomi suatu negara.

2.1.3 Teori Ekonomi Kelembagaan Baru

Teori Ekonomi Kelembagaan Baru muncul sebagai respons terhadap keterbatasan teori neoklasik yang mengabaikan peran aturan dan struktur kelembagaan dalam proses ekonomi. North (1990) menekankan bahwa lembaga merupakan “aturan main” yang membentuk insentif ekonomi dan menentukan arah perkembangan suatu perekonomian. Lembaga yang inklusif menciptakan insentif bagi masyarakat untuk berinovasi, bekerja keras, dan berinvestasi dalam kegiatan produktif. Dalam demokrasi, sistem politik yang terbuka memberikan jaminan terhadap hak kepemilikan dan mendorong efisiensi pasar melalui kebijakan yang akuntabel. Oleh karena itu, semakin baik kualitas lembaga politik suatu wilayah, semakin tinggi pula potensi pertumbuhan ekonomi.

Teori ekonomi kelembagaan baru menjelaskan bahwa perbedaan kinerja ekonomi antarnegara bukan hanya disebabkan oleh faktor sumber daya alam atau geografi, melainkan oleh perbedaan struktur kelembagaan (Rodrik, Subramanian, & Trebbi, 2004). Negara dengan lembaga inklusif cenderung menciptakan peluang ekonomi yang merata dan mengurangi ketimpangan dalam akses terhadap modal dan pendidikan. Demokrasi sebagai bentuk kelembagaan politik yang inklusif memungkinkan masyarakat untuk turut serta dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini pada akhirnya memperkuat legitimasi kebijakan ekonomi dan menciptakan lingkungan yang stabil bagi kegiatan bisnis dan investasi (Acemoglu & Robinson, 2016).

Kualitas kelembagaan yang tinggi juga berhubungan erat dengan tingkat efisiensi alokasi sumber daya ekonomi. Menurut Glaeser et al. (2014), negara yang memiliki lembaga politik yang akuntabel dan transparan cenderung mengalokasikan sumber daya publik secara lebih efisien dibandingkan negara dengan lembaga otoriter. Lembaga demokratis memungkinkan adanya pengawasan publik terhadap kebijakan fiskal dan moneter, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Dengan demikian, demokrasi berperan sebagai mekanisme pengawasan sosial yang memperkuat efisiensi ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor.

Selain itu, teori ekonomi kelembagaan baru juga menyoroti hubungan antara institusi dan inovasi teknologi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi

(Rodrik, 2014). Demokrasi menyediakan lingkungan yang mendukung kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Hal ini memungkinkan perusahaan dan individu untuk berinovasi tanpa takut terhadap represi atau penyitaan hasil temuan mereka. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas demokrasi diukur melalui Indeks Demokrasi Indonesia dapat dikaitkan langsung dengan peningkatan produktivitas dan inovasi ekonomi regional.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme peningkatan permintaan agregat dan penyediaan infrastruktur publik yang menunjang produktivitas sektor swasta. Menurut Sinurat dkk (2024), peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi karena memperluas kapasitas produksi nasional. Sementara itu, penelitian Rosiana dan Laut (2022) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang dialokasikan secara efisien dapat menciptakan multiplier effect yang signifikan terhadap output nasional. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal ekspansif melalui belanja publik berpotensi memperkuat daya dorong ekonomi terutama di daerah berkembang.

Di negara berkembang, investasi publik berfungsi sebagai katalis bagi investasi swasta karena mampu memperbaiki kualitas infrastruktur dan menurunkan biaya transaksi. Sejalan dengan teori Keynesian, belanja pemerintah dapat menjadi instrumen untuk menstabilkan fluktuasi ekonomi, terutama saat permintaan agregat menurun. Dengan demikian, pengeluaran publik yang terarah tidak hanya meningkatkan output jangka pendek tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Selanjutnya, Wahyudi (2023) menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah juga berperan dalam menciptakan stabilitas ekonomi melalui kebijakan redistribusi dan perlindungan sosial. Dalam situasi ketimpangan ekonomi yang tinggi, belanja pemerintah mampu menstimulasi daya beli masyarakat berpendapatan rendah sehingga memperluas pasar domestik.

2.2.2 Penanaman Modal Asing dengan Pertumbuhan Ekonomi

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. PMA menyediakan tambahan modal finansial yang membantu peningkatan investasi pada sektor-sektor produktif. Selain modal, PMA juga membawa teknologi baru dan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi proses produksi di negara penerima. Teknologi yang dibawa perusahaan multinasional biasanya lebih maju dibanding teknologi yang digunakan perusahaan lokal, sehingga keberadaannya mampu mempercepat peningkatan produktivitas nasional (Borensztein, De Gregorio, & Lee, 1998).

Penanaman Modal Asing juga berperan dalam mentransfer keterampilan dan pengetahuan manajerial kepada tenaga kerja lokal. Perusahaan asing umumnya melatih tenaga kerja dalam penggunaan teknologi modern, sistem produksi, hingga praktik manajemen yang lebih efisien. Proses alih keterampilan ini pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia domestik dan memperkuat daya saing tenaga kerja di pasar global (Barro & Sala-i-Martin, 2004).

Selain itu, masuknya PMA membuka akses yang lebih luas terhadap pasar internasional melalui integrasi ke dalam rantai pasok global. Kehadiran perusahaan multinasional sering kali menghubungkan produksi domestik dengan jaringan distribusi global, sehingga mendorong peningkatan ekspor dan memperkuat posisi perdagangan internasional negara penerima (Alfaro et al., 2004). Dengan adanya Penanaman Modal Asing diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

2.2.3 Penanaman Modal Dalam Negeri dengan Pertumbuhan Ekonomi

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dianggap memegang peranan strategis dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara berkembang. Investasi domestik diyakini lebih berkelanjutan karena ditopang oleh pelaku usaha nasional yang memahami kondisi pasar lokal. Menurut Todaro dan Smith (2015) investasi domestik mampu menciptakan efek pengganda yang kuat, karena keuntungan yang dihasilkan cenderung berputar kembali dalam

perekonomian domestik, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan. PMDN juga menandakan adanya peningkatan investasi domestik mendorong akumulasi kapital dan menciptakan lapangan kerja baru.

PMDN berperan penting dalam mendukung pembangunan sektor-sektor prioritas yang seringkali kurang diminati investor asing. Menurut Aswicahyono, Hill, dan Narjoko (2011), investasi domestik cenderung lebih terkonsentrasi pada sektor-sektor yang berorientasi lokal, seperti infrastruktur, pertanian, dan industri kecil-menengah. Hal ini berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan, terutama di wilayah yang kurang menarik bagi Penanaman Modal Asing (PMA). Keterlibatan PMDN juga memperkuat basis industri nasional.

Menurut Tambunan (2011), investasi domestik dalam sektor industri pengolahan mampu meningkatkan nilai tambah, memperluas jaringan usaha lokal, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Menurut Sjafrizal (2012), investasi yang dilakukan pelaku usaha domestik, baik melalui proyek langsung maupun kerja sama publik-swasta, membantu memperbaiki konektivitas antarwilayah. Infrastruktur yang memadai kemudian memperlancar distribusi barang dan jasa, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi regional yang lebih merata dan investasi domestik lebih tahan terhadap gejolak eksternal dibanding PMA karena tidak mudah dipengaruhi oleh volatilitas global.

2.2.4 Penanaman Modal Asing dengan Pengeluaran Pemerintah

Dalam pandangan Teori Pertumbuhan Endogen yang dikemukakan oleh Paul Romer (1990) dan Robert Lucas (1988), investasi asing dipandang sebagai salah satu sumber utama akumulasi pengetahuan, transfer teknologi, dan peningkatan kualitas modal manusia yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Penanaman Modal Asing (PMA) tidak hanya menambah stok modal fisik, tetapi juga menghasilkan spillover produktivitas melalui inovasi, praktik manajerial modern, dan integrasi ke dalam jaringan produksi global. Peningkatan produktivitas tersebut memperluas output regional dan meningkatkan pendapatan perusahaan serta rumah tangga, yang pada akhirnya memperbesar basis pajak pemerintah. Dengan teori ini, hubungan PMA terhadap pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan melalui jalur kapasitas fiskal, di mana pertumbuhan ekonomi yang

dipicu oleh PMA memperluas ruang fiskal sehingga memungkinkan pemerintah meningkatkan belanja publik.

PMA sering kali berperan sebagai sumber pembiayaan tambahan bagi proyek infrastruktur publik dan pembangunan ekonomi (Menyah et al., 2014). Ketika investasi asing meningkat, pemerintah cenderung menyesuaikan kebijakan fiskalnya untuk menyediakan fasilitas publik dan insentif yang mendukung aktivitas investor. Hal ini menciptakan hubungan timbal balik, di mana peningkatan PMA dapat memicu peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor produktif untuk menjaga daya saing ekonomi regional.

Keberadaan PMA dapat mendorong pemerintah untuk memperluas pengeluaran publik melalui kebijakan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Studi oleh Hayat (2018) menunjukkan bahwa arus PMA memiliki efek pengganda terhadap belanja publik, karena mendorong pemerintah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan memperbaiki iklim investasi. Pemerintah daerah yang menerima investasi asing besar cenderung meningkatkan anggaran di bidang transportasi, energi, dan pendidikan guna menarik lebih banyak investor. Dengan demikian, PMA berfungsi sebagai pendorong tidak langsung bagi kebijakan fiskal ekspansif yang mendukung pembangunan jangka panjang.

Namun, hubungan antara PMA dan pengeluaran pemerintah tidak selalu bersifat positif, terutama ketika pemerintah harus menanggung biaya fiskal dalam bentuk subsidi atau insentif pajak. Menurut Mahmood dan Chaudhary (2013), pemerintah di negara berkembang sering kali meningkatkan pengeluaran non-produktif untuk mempertahankan arus investasi asing, yang justru dapat menekan keseimbangan fiskal. Ketergantungan pada investasi asing tanpa strategi pengelolaan yang baik dapat menyebabkan distorsi fiskal dan mengurangi ruang fiskal untuk pengeluaran sosial. Oleh karena itu, efektivitas hubungan antara PMA dan belanja publik sangat bergantung pada tata kelola fiskal dan desain kebijakan investasi yang diterapkan.

Di sisi lain, PMA yang berkelanjutan dan berbasis sektor produktif dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah melalui peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan temuan Saini dan Singhania (2018), investasi asing yang diarahkan

pada sektor industri dan jasa modern mampu memperluas basis pajak pemerintah, sehingga meningkatkan kemampuan fiskal untuk membiayai pengeluaran publik. Dalam jangka panjang, efek ini menciptakan siklus positif antara peningkatan investasi dan kapasitas pengeluaran pemerintah

2.2.5 Penanaman Modal Dalam Negeri dengan Pengeluaran Pemerintah

PMDN sering kali dianggap sebagai sumber pembiayaan tambahan bagi proyek infrastruktur publik dan pembangunan ekonomi. Dalam Teori Pertumbuhan Endogen yang dikembangkan oleh Paul Romer (1990) dan Robert Lucas (1988), investasi domestik memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal fisik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan inovasi yang bersifat endogen. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak hanya memperluas kapasitas produksi, tetapi juga menghasilkan spillover produktivitas yang meningkatkan output regional secara berkelanjutan. Peningkatan output tersebut memperbesar basis pajak daerah melalui kenaikan pendapatan perusahaan dan rumah tangga, yang pada akhirnya memperluas kapasitas fiskal pemerintah. Teori pertumbuhan endogen memperkuat Hubungan PMDN terhadap pengeluaran pemerintah melalui jalur kapasitas fiskal, di mana peningkatan investasi domestik memperluas ruang fiskal yang memungkinkan pemerintah meningkatkan belanja publik.

Lebih lanjut, peningkatan PMDN sering kali mencerminkan kepercayaan pelaku ekonomi terhadap kebijakan pemerintah, yang pada gilirannya memicu alokasi anggaran lebih besar untuk program-program pembangunan. Menurut Isnawati dkk (2020), pemerintah cenderung meningkatkan pengeluaran produktif sebagai respons terhadap naiknya aktivitas investasi domestik yang membutuhkan dukungan infrastruktur dan layanan publik. Di sisi lain, meningkatnya belanja pemerintah juga menciptakan efek pengganda yang memperkuat PMDN melalui peningkatan permintaan agregat. Dengan artian lain, terdapat hubungan timbal balik antara investasi domestik dan kebijakan fiskal yang saling memperkuat satu sama lain.

Namun, hubungan antara PMDN dan pengeluaran pemerintah dapat berbeda tergantung pada efektivitas tata kelola fiskal di suatu daerah. Jika

pemerintah mampu mengalokasikan anggaran secara efisien, peningkatan PMDN akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan penguatan kapasitas fiskal (Suryani & Suhatman, 2020). Sebaliknya, jika belanja pemerintah lebih banyak diarahkan pada sektor non-produktif, maka manfaat dari peningkatan PMDN menjadi kurang optimal.

Dalam jangka panjang, interaksi positif antara PMDN dan pengeluaran pemerintah dapat memperkuat struktur ekonomi domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap modal asing. peningkatan investasi dalam negeri yang didukung oleh pengeluaran pemerintah di sektor strategis seperti infrastruktur dan pendidikan mampu meningkatkan daya saing daerah.

2.2.6 Tingkat Demokrasi dengan Pengeluaran Pemerintah

Dalam negara demokratis, partisipasi masyarakat dan lembaga legislatif yang kuat memaksa pemerintah untuk menyalurkan pengeluaran publik ke sektor yang lebih produktif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat (Streb et al., 2012). Pemerintah daerah dengan tingkat demokrasi yang tinggi lebih terdorong untuk memperluas belanja sosial dan infrastruktur karena tekanan politik untuk mempertahankan legitimasi di hadapan publik (Aidt & Eterovic, 2011). Dengan demikian, demokrasi yang berkembang dapat mendorong alokasi sumber daya fiskal yang lebih efisien serta meningkatkan keadilan dalam distribusi pengeluaran pemerintah.

Selain itu, demokrasi juga berperan dalam memoderasi pola pengeluaran publik melalui mekanisme check and balance yang membatasi kecenderungan pengeluaran yang bersifat koruptif. Studi oleh Alt dan Lassen (2010) menunjukkan bahwa tingkat transparansi fiskal lebih tinggi di negara dengan demokrasi mapan, karena masyarakat memiliki akses informasi yang luas terhadap anggaran dan kebijakan fiskal. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam menentukan prioritas belanja publik agar sesuai dengan aspirasi rakyat. Dengan kata lain, semakin tinggi indeks demokrasi suatu daerah, semakin rendah potensi penyalahgunaan anggaran dan semakin tinggi efisiensi belanja publik.

Selain itu, demokrasi yang kuat dapat memperkuat hubungan positif antara pengeluaran publik dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas kelembagaan. Menurut Asatryan et al. (2016), demokrasi memungkinkan

pengawasan publik yang efektif terhadap proyek-proyek pemerintah, sehingga meningkatkan efektivitas belanja modal dan mengurangi kebocoran fiskal. Daerah dengan nilai demokrasi tinggi biasanya menunjukkan proporsi belanja modal yang lebih besar terhadap total anggaran, karena fokus pada pembangunan jangka panjang. Hal ini menjadikan demokrasi sebagai katalis dalam menciptakan tata kelola fiskal yang baik dan pengeluaran yang pro-pembangunan. Namun, beberapa penelitian juga mencatat bahwa demokrasi yang belum matang dapat memicu peningkatan pengeluaran yang bersifat populis. Keefer dan Vlaicu (2013) menjelaskan bahwa di negara dengan demokrasi baru berkembang, kompetisi politik sering mendorong pemerintah untuk memperbesar belanja publik jangka pendek demi popularitas, bukan efisiensi ekonomi. Fenomena ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan anggaran dan mengurangi kualitas pengeluaran pemerintah.

2.3 Tinjauan Empiris

Susanti dan Siregar (2025) dalam penelitiannya menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah dan Tingkat Investasi secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan dan Sulawesi tahun 2016-2020. Dalam penelitiannya menggunakan metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah dan tingkat Investasi secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan dan Sulawesi.

Pratama & Rofiuddin (2023) dalam penelitiannya bertujuan menginvestigasi pengaruh penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, utang luar negeri, dan surat berharga syariah negara terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012-2022. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sementara utang luar negeri terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut. Namun, tidak ada bukti bahwa surat berharga syariah negara memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dahliah (2023) dalam penelitiannya bertujuan menguji serta mengetahui pengaruh inflasi, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar Tahun 2010-2020. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Inflasi dan PMA memberikan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Sementara PMDN memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.

Rasjid dkk (2021) dalam penelitiannya bertujuan menganalisis pengaruh Belanja Modal Pemerintah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara tahun 2005-2017. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa, variabel Belanja Modal Pemerintah, Tenaga Kerja, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan variabel Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dan pada penelitian yang dilakukan secara simultan, menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal Pemerintah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

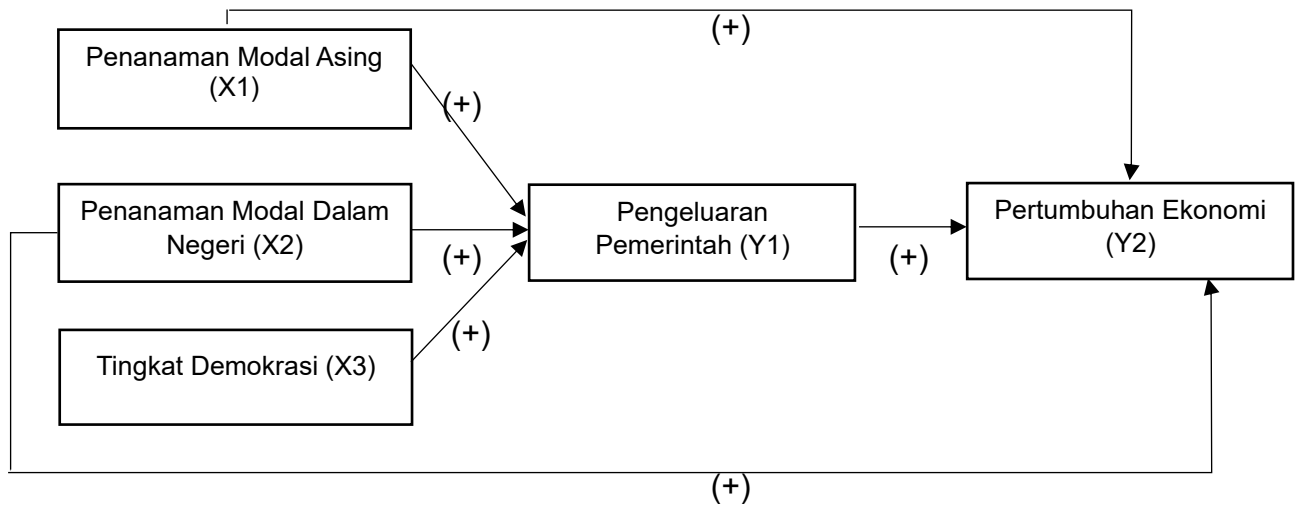
Juliansyah dkk (2024) dalam penelitiannya bertujuan menganalisis pengaruh jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tenaga kerja di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1993-2023. Penelitian ini menggunakan model *Autoregressive Distributed Lag (ARDL)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tenaga kerja, dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam jangka panjang, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tenaga kerja, dan penanaman modal dalam negeri juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Safitri (2022) dalam penelitiannya bertujuan menganalisis pengaruh PMA, PMDN, pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja terhadap PDRB di Sumatera Utara. Dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMDN dan tenaga kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara PMA berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Pengeluaran pemerintah memiliki kontribusi besar dalam memperkuat pertumbuhan daerah.

Afrizal (2015) dalam penelitiannya bertujuan menganalisis peranan PMA dan PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Provinsi Jambi tahun 1990–2012. Dalam penelitian ini menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMDN berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sedangkan PMA memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Penelitian ini mengindikasikan bahwa ketergantungan terhadap investasi asing tidak selalu konsisten mendorong pembangunan regional. Sebaliknya, investasi domestik terbukti menjadi motor utama pembangunan.

Zuraida (2024) dalam penelitiannya bertujuan meneliti hubungan investasi domestik, UMP, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo tahun 2001–2021. Metode penelitian yang digunakan adalah *Error Correction Model (ECM)* untuk melihat hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMDN memiliki pengaruh signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sementara UMP hanya berpengaruh dalam jangka pendek.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian yang telah digambarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga penanaman modal asing berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengeluaran pemerintah di Pulau Sulawesi.
2. Diduga penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengeluaran pemerintah di Pulau Sulawesi.
3. Diduga tingkat demokrasi berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah di Pulau Sulawesi.
4. Diduga pengeluaran pemerintah mampu memediasi penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan tingkat demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi